



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI YANTINI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. NHK : 759509

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **717.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/42 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 77.500.000
2. Tanah Seluas 806 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 724 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 822 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 1774 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **86.449.000**

1. MOTOR, YAMAHA SIGMA Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 950.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.999.000
4. MOBIL, TOYOTA STATION Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



6. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	806.949.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	806.949.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.